

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nofi Rosidah

Novirosidah08@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) SURABAYA

ABSTRACT

This research is meant to find out the performance of the implementation of Budget Expenditure of Development Planning Agency at Sub-National Level of East Java in 2012-2015. The budget performance assessment can be known after the use and the absorption of the budget to carry out the programs and activities which exist in Development Planning Agency at Sub-National Level of East Java Province, in achieving the efficiency and the effectiveness of performance. Based on the result of the analysis of variance, it can be seen that the expenditure in 2012 is 91.36%; in 2013 is 91.67%; in 2014 is 88.94%; in 2015 is 91.57%. Meanwhile, the aspects of expenditure growth in 2012-2013 periods is 17.39%; in 2013-2014 is 15.9%; and in 2014-2015 is 9.78%. Based on the result of the analysis of the harmony and the efficiency and the effectiveness of the expenditure, it can be concluded that the performance should be improved in managing the local government budget, so that the efficiency and the effectiveness of the performance of the implementation of the budget expenditure can be improved.

Keywords: Budget Expenditure, Performance Assessment, Efficiency, Effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Penilaian kinerja anggaran dapat diketahui setelah penggunaan dan penyerapan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam mencapai kinerja yang efisien dan efektifitas. Berdasarkan analisis variansi belanja dapat di lihat bahwa pada tahun 2012 sebesar 91,36%, pada tahun 2013 sebesar 91,67%, pada tahun 2014 sebesar 88,94%, pada tahun 2015 sebesar 91,57%. Sedangkan aspek pertumbuhan belanja 2012-2013 adalah sebesar 17,39%, pada tahun 2013-2014 sebesar 15,9%, dan pada tahun 2014-2015 sebesar 9,78%. Berdasarkan analisis keserasian belanja serta efisiensi dan efektifitas supaya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, sehingga kinerja efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja dapat meningkat.

Kata Kunci: Anggaran Belanja, Penilaian Kinerja, Efisiensi, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pelaksanaan anggaran kinerja pada dasarnya didukung beberapa kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di bermaksud untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam pemerintah daerah, diharapkan mampu memberikan motivasi untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara terpadu, agar setiap pembangunan yang ada sesuai dengan prioritas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan, diperoleh sesuai pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

Bappeda Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dibidang perencanaan daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Melalui sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagaimana urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Bappeda sebagai lembaga pemerintah yang juga berkewajiban untuk mengembangkan akuntabilitas baik dalam kerangka *external accountability* maupun *internal accountability*, dalam perspektif *External accountability*. Instansi pemerintah adalah penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kerjanya kepada publik. Sedangkan *internal accountability* adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan informasi kerjanya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

TINJAUAN TEORITIS

Kinerja

Mulyadi (2007:337) kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.

Pengertian Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran diartikan dalam tiga hal sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan anggaran dalam pemenuhan belanjadan realisasinya dalam Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah. Setidaknya ada unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang dapat menjadikan pemakaian anggaran dan belanja menjadi semakin efektif dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan dari pendapat yang terdiri dari : 1) Analisis Varians Belanja 2) Analisis Pertumbuhan Belanja. 3) Analisis Keserasian Belanja, terdiri dari : a) Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja b) Analisis Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja 4) Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu dengan membandingkan capaian hasil pada periode saat ini dan pada periode lainnya di tahun sebelumnya. Untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi dengan analisa ini pemerintah dapat menilai.

Pengertian Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Pentingnya Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahmudi (2007:12) pengukuran kinerja merupakan alata untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan longitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pelayanan publik tersebut yang menjadi *bottom line* dalam organisasi sektor publik. Beberapa negara maju menggunakan strategi dan pendekatan yang berbeda-beda untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

Tujuan atau Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan catatan pencapaian indikator kinerja, suatu organisasi diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Kegiatan dan program organisasi seharusnya dapat diukur dan dievaluasi

Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dari badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jawa timur adalah : 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 3851). 2) Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 Nomor 25 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4817). 3) Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lemberran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 21 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4817). 4) Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5) Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja. 6) Keputusan lembaga administrasi negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporann akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Anggaran Sektor Publik

Mahmudi (2011:60) anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran sektor publik dari sudut pandang makro berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya publik, melakukan distribusi ekonomi, dan menciptakan stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik (Mardiasmo 2009:62) Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. . Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 1) Berisi biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); 2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran

Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Mahmudi (2011:59) anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup untuk pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi, dan diperdebatkan.

Anggaran sektor publik harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat diakomodasi dalam anggaran. Anggaran sektor publik merupakan *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

Julita dan Jufrizen (2012:9) mengatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. untuk masa yang akan datang.

Deddi dan Ayuningtyas (2010:70) mengatakan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Oleh karena itu organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pentingnya anggaran

Mardiasmo (2009:62) tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yang akan datang.

Ketentuan pelaksanaan anggaran

Darise (2008:163) Dalam pelaksanaan anggaran belanja terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKPD sebagai pengguna anggaran: 1) pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Setiap pengeluaran belanja atas bebas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. 3) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, atau yang tidak cukup tersedia.

Konsep Belanja Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan peraturan

Menteri dalam Negeri N0. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi.

Belanja Langsung

Darise (2008:141) Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sehingga kelompok belanja tersebut ditemui pada seluruh SKPD sebagai pengguna anggaran.

Belanja langsung terdiri atas belanja: 1) Belanja Pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, 2) Belanja barang dan jasa Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program. Belanja barang dan jasa bersifat rutin karena terjadi terus-menerus.

Belanja Tidak Langsung

Darise (2008:139) Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*pricipal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, 3) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

BAPPEDA

BAPPEDA adalah badan perencanaan pembangunan daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten atau kota yang merupakan staf dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab kepada bupati dan walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengankeputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentangpembentukan BAPPEDA yang mana BAPPEDA mempunyai dua tingkat kedudukan.

Pertama, BAPPEDA tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan BAPPEDA tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota) BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No. 27 Tahun 1980. Badan ini adalah badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalammenentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek

atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta, dan karakteristik, objek yang diteliti secara tepat.

Gambaran dari Objek penelitian

Pengertian objek menurut para ahli merupakan apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Ada beberapa persoalan yang perlu untuk kita pahami supaya dapat menentukan serta menyusun objek penelitian di dalam metode penelitian dengan baik yaitu berhubungan dengan apa itu objek penelitian di dalam penelitian kualitatif. Selain itu apa saja objek penelitiannya dan juga kriteria seperti apa yang bisa dijadikan objek dari penelitian yang kita lakukan. objek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 102-108, Kota Surabaya, Jawa Timur, pengumpulan data penelitian pada Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Jawa Timur mulai pada tahun 2011-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Data ini di ambil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPPEDA) Jl. Pahlawan No. 102-108, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234 Tlp. (031) 3554855, Fax. (031) 3533 76, Email : redaksi@bappeda.jatimprov.go.id.

Satuan Kajian

Kinerja pelaksanaan anggaran adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian kualitatif lebih menekankan maknadaripada generalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitiannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara taarget dengan realisasi yang dicapai dalam jangka satu tahun berjalan.

Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capain Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dengan indikator kerja yang ditetapkan secara mandiri.

Tabel 1
Capaian Kinerja 2012
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah	1. Ketepatan waktu tahap perencanaan pembangunan dan penyelesaian dokumen perencanaan	100%	100%	100%
	2. Tindak lanjut rekomendasi dokumen perencanaan pembangunan kab/kota	95%	100%	105,26%
	3. Program pembangunan kab/kota yang diakomodir provinsi	50%	57,37	114%
	4. Kegiatan pembangunan kab/kota yang diakomodir provinsi	50%	29,37%	58,74%
	5. Tindak lanjut rekomendasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
	6. Kesesuaian muatan substansi RTRW kab kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW nasional	80%	84,21%	105%
2. Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu	90%	95%	111,8%
	2. Data kab/kota hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu	85%	90%	94,4%
	3. Laporan program/kegiatan SKPD yang tepat waktu	90%	93,485%	106,98%
3. Meningkatnya kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan	Usulan Rekomendasi ke pusat yang tidak dilanjutkan oleh pemerintah pusat	90%	85%	94,4%

Sumber : Bappedda Jawa Timur

Dalam tabel diatas dapat di jelaskan bahwa selama tahun 2012 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 2
Capaian Kinerja 2013
Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Kesesuaian perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah	1. Prosentase indikator program daerah yang diakomodir oleh pemerintah pusat	100%	100%	100%
	2. Tindak lanjut rekomendasi dokumen perencanaan pembangunan kota/kab	96%	100%	104,1%
	3. Program pembangunan kab/kota yang diakomodir provinsi	55%	53,2%	96,7%
	4. Tindak lanjut rekomendasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
	5. Kegiatan Pembangunan kab/kota yang diakomodir provinsi	55%	21,17%	38,49%
	6. Kesesuaian muatan substansi RTRW kab/kota dengan RTRW provinsi dan RTRW nasional	90%	94,73%	105,25%
2. Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Data SKPD hasil pelaksanaan pemyang pembangunan yang akurat dan tepat waktu	95%	96%	101,5%
	2. Data kab/kota hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu	90%	92%	102,22%
	3. Laporan program kegiatan SKPD yang tepat waktu	92%	94,01%	102,18%
3. Meningkatnya kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan	1. Presentase jumlah DIPA APBN kab/kota yang dilaporkan ke propinsi	92%	87%	94,5%

Sumber : Bappeda Jawa Timur

Dalam tabel diatas dapat di jelaskan bahwa selama tahun 2013 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3
Capaian Kinerja 2014
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.Kesesuaian perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah.	1.Prosentase indikator program daerah yang diakomodir oleh pemerintah pusat.	100%	100%	100%
	2.Tindak lanjut rekomendasi dokumen perencanaan pembangunan kab/kota.	98%	98,75%	100,77%
	3.Program pembangunan kab/kota yang diakomodir provinsi.	60%	52,50%	87,50%
	4.Kegiatan pembangunan kab/kota diakomodir provinsi.	60%	36,70%	61,20%
	5. Tindak lanjut rekomendasi perencanaan pembangunan.	100%	100%	100%
	6.Kesesuaian muatan substansi RTRW kab/ kota dengan RTRW provinsi dan RTRW nasional.	100%	97,37%	97,37%
2.Tersediannya data perencanaan pembangunan yang berkualitas.	1.Data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu.	100%	98%	98%
	2.Data kab/kota hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu.	95%	95%	100%
	3.Laporan program/kegiatanSKPD yang tepat waktu.	95%	98,175	103,34%
	4. Prosentase konsistensi/kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS.	100%	100%	100%
	5.Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA.	100%	90,14%	90,14%
3.Meningkatnya kualitas pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan.	1.Persentase jumlah DIPA APBN kab/ kota yang dilaporkan ke provinsi.	100%	95,50%	95,50%

Sumber : Bappeda Jawa Timur

Dalam tabel diatas dapat di jelaskan bahwa selama tahun 2014 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 4
Capaian Kinerja Tahun 2015
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Mekanisme Perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasi	100%	100%	100%
	2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	30%	46,50%	155%
	3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%	75,32%	107,61%
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	95%	98,62%	108,5%
	2. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) 77%	85%	92,26%	108,5%
	3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	80%	90,27%	112%
	4. Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik	80%	82,75%	103,43%

Sumber : Bappeda Jawa Timur

Dalam tabel diatas dapat di jelaskan bahwa selama tahun 2015 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Analisis Varian Belanja

Analisis Varian Belanja merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun yang tersedia di tahun anggaran tersebut :

Tabel 5
Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah BAPEDDA Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2012	Rp.104.768.843.000	Rp.95.722.879.977	Rp.83.516.056.515	Rp.12.206.823.462
2013	Rp.98.411.481.000	Rp.90.219.078.687	Rp.12.914.651.000	Rp.12.548.336.738
2014	Rp.107.794.522.000	Rp.95.871.532.627	Rp.83.104.958,863	Rp.12.766.573.764
2015	Rp.94.005.750.500	Rp.86.085.648.283	Rp.78.951.497.500	Rp.14.179.227.060

Sumber : Data perkiraan anggaran Bappeda Jawa Timur

Dari data diatas dengan menggunakan rumus Analisis varians belanja maka kesimpulan data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran}$$

Tabel 6
Tabel Analisis Varian Belanja Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	%
2012	Rp.95.722.879.977	Rp.104.768.843.000	Rp.9.045.963.023	91,36 %
2013	Rp.90.219.078.687	Rp.98.411.481.000	Rp.8.192.402.313	91,67 %
2014	Rp.95.871.532.627	Rp.107.794.522.000	Rp.11.922.989.373	88,94 %
2015	Rp.86.085.648.283	Rp.94.005.750.500	Rp.7.920.102.217	91,57 %

Sumber : Bappeda Jawa Timur (diolah)

Di tahun 2012 penggunaan anggaran yang terpakai pada tabel analisis varian belanja adalah sekitar Rp.9.045.963.023 atau sekitar 91,36% sedangkan di tahun 2013 penggunaan anggaran sekitar Rp.192.402.313 atau sekitar 91,67% yang mengalami peningkatan 0,31 dari tahun sebelumnya dari analis. Di tahun 2014 penggunaan anggaran yang terpakai sekitar Rp. 11.922.989.373 atau sekitar 88,94 dimana ditahun 2014 ini mengalami penurunan 2,73% dari tahun sebelumnya sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,63% dimana dalam penggunaan tahun 2015 adalah Rp.7.920.102.217 atau sekitar 91,57%.

Dari analisis belanja di atas dapat dikatakan kurang efisien walaupun pada tahun 2014 cukup efisien akan tetapi di tahun 2015 mengalami kenaikan penggunaan anggaran meskipun di tahun 2015. Secara umum dapat dikatakan bahwa selisih yang signifikan dari anggaran yang ada sangat dimungkinkan terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga program-program yang sudah ada belum terlaksana dengan maksimal penyerapan anggaran tidak mencapai efisiensi.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pemerintah mampu mempertahankan atau meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya maka pertumbuhan positif, sebaliknya jika pemerintah daerah tidak mampu mempertahankan maka pertumbuhan negatif. Rumus pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}t - \text{Realisasi Belanja Tahun}t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun}t-1} \times 100\%$$

Tabel 7
Tabel Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2012-2015

Uraian	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Realisasi Belanja tahun t-1	Rp.95.722.879.977	Rp.90.219.078.687	Rp.95.871.532.627
Realisasi Belanja tahun t	Rp.90.219.078.687	Rp.95.871.532.627	Rp.86.085.648.283
Kenaikan/Turunan	Rp.5.503.801.290	Rp.5.625.453.940	Rp.9.785.884.344
%	17,39	15,9	9,78

Sumber : Bappeda Jawa Timur (diolah)

Dari tabel analisis pertumbuhan belanja 2013 sebesar Rp.5.503.801.290 dengan presentase sebesar 17,39% dari pagu anggaran di tahun 2012, sedangkan di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.5.625.453.930 dengan presentase sebesar 15,9% dari pagu anggaran di tahun 2013, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.9.785.884.344 dengan presentase sebesar 9,78% dari pagu anggaran 2014.

Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja jika belanja langsung lebih besar dari pada belanja langsung dianggap tidak baik, demikian juga sebaliknya. Jika belanja pegawai $\geq 50\%$ dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik, demikian juga sebaliknya.

Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanjatidak langsung terhadap total belanja dalam APBD. Rumus yang dapat digunakan adalah:

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung} \times 100\%}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 8
Tabel Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	%
2012	Rp.12.206.823.462	Rp.95.722.879.977	12,7%
2013	Rp.12.548.336.738	Rp.90.219.078.687	13,9%
2014	Rp.12.766.573.764	Rp.95.871.532.627	13,3%
2015	Rp.14.179.227.066	Rp.86.085.648.283	16,4%

Sumber : Bappeda Jawa Timur (diolah)

Dapat dilihat dari tabel analisis belanja tidak langsung mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak terlalu banyak dari tahun anggaran di tahun 2012 total belanja yang terserap sekitar Rp.12.206.823.462 dengan presentase 12,7% lalu di tahun 2013 mengalami kenaikan total belanja tidak langsung sebesar Rp.12.548.336.738 dengan presentase sebesar 13,9% ditahun 2014 total belanja mengalami kenaikan sebesar Rp.12.766.573.764 dengan presentase 13,3% dan pada saat tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.14.179.227.066 dengan presentase 16,4% yang cukup banyak dari tahun-tahun sebelumnya namun pada tahun-tahun sebelumnya kenaikannya tidak begitu signifikan.

Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi. Rumusnya yaitu :

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung} \times 100\%}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 9
Tabel Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja	%
2012	Rp.83.516.056.515	Rp.95.722.879.977	87,2
2013	Rp.12.914.651.000	Rp.90.219.078.687	93,1
2014	Rp.83.104.958.863	Rp.95.871.532.627	85,7
2015	Rp.78.951.497.500	Rp.86.085.648.283	83,6

Sumber : Bappeda Jawa Timur (diolah)

Dari data Analisis Belanja Langsung diatas dapat diktakan bahwa padatahun 2012 hasil analisis menunjukkan pada angka 87,2% dari total anggaran Rp.95.722.879.977 pada tahun 2013 menunjukkan angka presentase sebesar 93,1% dari total anggaran Rp.90.722.879.977 pada tahun 2014 menunjukkan angka presentase sebesar 85,7% dari total anggaran Rp.95.871.532.627 dan pada tahun 2015 menunjukkan angka presentase sebesar 83,6% dari total anggaran 86.085.648.283.

Analisis Efektifitas

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atay sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan(*spending wisely*).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi adalah sebagai berikut : 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatan sangat efektif. 2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatan efektif. 3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatan cukup efektif. 4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatan kurang efektif. 5) Jika hasil pencapaian di bawah 60% maka anggaran belanja dikatan tidak efektif.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Rumus pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 10
Analisis Rasio Efektifitas

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efektifias	Keterangan
2012	Rp.95.722.879.977	Rp.104.768.843.000	91,36%	Efektif
2013	Rp.90.219.078.687	Rp.98.411.481.000	91,68%	Efektif
2014	Rp.95.871.532.627	Rp.107.794.522.000	88,94%	Cukup Efektif
2015	Rp.86.085.648.283	Rp.94.005.750.500	91,57%	Efektif

Sumber : Bappeda Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 efektifitas anggaran belanja mencapai presentase91,36%dengan penggunaan sebesar Rp.104.763.843.000 maka dapat dikatan efektif. Pada tahun 2013 mengalami peningkatansebesar 0,32% di tahun 2013

menjadi 91,6 % dengan anggaran belanja Rp.98.411.481.000 maka dapat dikatakan efektif. Lalu di tahun 2014 mengalami penurunan 4,82% menjadi 88,94% dengan penggunaan 107.794.522,00 maka dapat dikatakan efektif. Dan di tahun 2015 mengalami kenaikan 2,63% menjadi 91,57% dengan penggunaan sebesar Rp.94.005.750.500. Dalam tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 terbelang dalam kondisi yang stabil dalam dalam pelaksanaannya.

Analisis Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) efisiensi hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antaramasukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi adalah sebagai berikut : 1) jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien. 2) jika hasil pencapaian antara 90% -100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien. 3) jika hasil pencapaian antara 80% -90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien. 4) jika hasil pencapaian antara 60% -80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien. 5) jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tingkat Efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung} \times 100\%}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$$

Tabel 11
Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Anggaran	Belanja Langsung	Tingkat Efisiensi	Keterangan
2012	Rp.104.768.843.000	Rp.83.516.056.515	25,44%	Sangat Efisien
2013	Rp.98.411.481.000	Rp.12.914.651.000	62,01%	Efisien
2014	Rp.107.794.522.000	Rp.83.104.958.863	29,70%	Sangat Efisien
2015	Rp.94.005.750.500	Rp.78.951.497.500	19,06%	Sangat Efisien

Sumber : Bappeda Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 25,44% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp.83.516.056.515 dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2012 sangat efisien. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 62,01% dimana di tahun ini tingkat efisiensi mengalami kenaikan sebesar 36,57% dari tahun 2012, dapat dikatakan efisien. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan persentase 29,70% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp.83.104.958.863 yang mengalami penurunan sebesar 25,44% dari tahun 2013, dapat dikatakan sangat efisien. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dengan persentase 19,06% dengan total anggaran Rp.78.951.497.500 yang mengalami penurunan 10,64%, dapat dikatakan sangat efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris, adanya pengaruh rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar terhadap return saham. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari tahun 2012-2015 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2) Sesuai dengan hasil Analisis Varians Belanja dapat diketahui bahwa kinerja anggaran belanja pada Bappeda Provinsi Jawa Timur dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2015. Pada tahun 2012 sebesar Rp.9.045.963.023 atau sebesar 91,36%, tahun 2013 sebesar Rp.8.192.402.313 atau sebesar 91,67%, tahun 2014 Rp.11.922.989.373 atau sebesar 88,94%, tahun 2015 Rp.7.920.102.217 atau sebesar 91,57. Menunjukkan kinerja yang baik karena ada hasil yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan. Dan sesuai hasil Analisis Varians Belanja dilihat bahwa adanya sisa anggaran belanja. 3) Pada Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2012 sampai dengan 2015 terus mengalami perubahan, naik dan turunnya dilihat dari segi angka persentase namun tingkat belanja yang dianggarkan tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun anggaran 2012-2013, Tahun anggaran 2013-2014, dan pada tahun anggaran 2014-2015 menunjukkan adanya perubahan belanja. Pada Tahun 2012-2013 adalah sebesar (17,39% atau 18%) Tahun 2013-2014 adalah sebesar (15,9% atau 16%) Tahun 2014-2015 adalah sebesar (9,78% atau 10%) dan Tahun. Masing-masing Tahun Anggaran memiliki tingkat penyerapan anggarannya masing sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan-kegiatan pembangunan. 4) Dari hasil perhitungan Analisis Keserasian Belanja, maka dapat disimpulkan bahwa dari lima periode tahun anggaran tersebut dapat dikatakan sudah baik, karena dapat dilihat Pada Tahun 2012 -2015 Bappeda Provinsi Jawa Timur telah berfokus pada belanja langsung. 5) Dari hasil perhitungan Analisis Rasio Efektifitas dapat dilihat dari tahun anggaran 2012-2015 Bappeda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan anggaran. Pada tahun 2012 dengan presentase 91,36%, pada tahun 2013 dengan presentase 91,68%, pada tahun 2014 dengan presentase 88,94%, pada tahun 2015 dengan presentase 91,57%. Dimana presentase-presentase tersebut menyatakan bahwa kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur efektif. 6) Untuk penilaian Analisis Rasio Efisiensi Belanja dapat dikatakan bahwa Bappeda sudah sangat baik dalam mengelola setiap penggunaan anggarannya. Karena pada tahun 2012 pada persentase 25,44%. Tahun 2013 pada persentase 62,01%. Tahun 2014 pada presentase 29,70% Tahun 2015 pada presentase 19,06%. Dimana presentase-presentase tersebut menyatakan bahwa kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur sangat efisien.

Secara umum hasil kinerja anggaran belanja Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2012-2015 sudah cukup baik, berkaitan dengan Analisis Varians Belanja dan Pertumbuhan Belanja. Berdasarkan Analisis Keserasian Belanja dan Analisis Efektivitas dan Efisiensi Belanja dapat dikatakan jika Bappeda sudah berhasil dalam menjalankan kinerja anggarannya dengan baik dan efisien.

Saran

Beberapa saran agar penelitian selanjutnya lebih baik lagi yaitu sebagai berikut: 1) Dari analisis keserasian belanja dapat disarankan, dengan adanya penggunaan anggaran yang sudah dikatakan sangat baik agar dapat dipertahankan agar tetap baik dalam penggunaan dan penyerapan anggaran belanja yang dilakukan oleh instansi. 2) Penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisis menunjukkan bahwa penyerapan kinerja anggaran yang ada pada Bappeda Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama bagi perencanaan dan pembangunan daerah. 3) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur agar semakin meningkatkan kinerja dalam mengelola anggaran belanja secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas produktifitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Airlangga. Jakarta.
- Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta.
- Deddi dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julita dan Jufrizen. 2012. *Budgeting*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. YKPN. Jakarta.
- _____, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- ___No. 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Dasar Anggaran Berbasis Kinerja.
- ___ No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara.
- PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- ___No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara.
- ___ No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
- www. Bappeda.com.*